

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Kabar Harian Suara Merdeka

Edisi Kamis, 30 Agustus 2018



Keakraban Jokowi-Prabowo Contoh bagi Pendukung

JAKARTA - Asian Games benar-benar menjadi momen yang mampu menyatukan dan menyejukan suhu politik.

Momen keakraban pun terjalin antara capres (petilasan) Joko Widodo dan capres penantang Prabowo Subianto pada ajang pertandingan Pencak Silat. Keakraban ini menunjukkan keakraban antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto saat merayakan kemenangan pesilat Hanifan Yudianto Kusumah. Momen ini sangat menggugah.

melelehkan hati seluruh rakyat.

Keakraban itu berlanjut dalam jumpa pers setelah penyerahan medali bagi atlet-atlet pencak silat. Jokowi dan Prabowo jumpa pers berteng setelah acara penyerahan medali atlet pencak silat. Wawancara ini berlangsung santai, akrab, dan penuh tawa.

Jokowi-Prabowo melayani pertanyaan wartawan saat acara penyerahan medali untuk atlet-atlet pencak silat. Keduanya juga ditemani oleh Presiden ke-5 Megawati Sukarnoputri, Menteri PMK Puan Maharani,

Kemas Kontingen Indonesia Kontin (tim) Syarifuddin, dan Kemas Harian PH (PS) Edo Prabowo.

"Saya mengucapkan terima kasih, yang kedua juga ingin memberikan selamat kepada teman baik saya, sahabat saya. Baik Prabowo, Subianto, yang mengemudikan. Beliau adalah Ketua IPSI, sehingga kita bisa semuanya, kita mendapatkan emas dari cabang olahraga pencak silat ini 14, sehingga total sekarang kita mendapatkan emas 30.

(Berlanjut him 7 kol 1)

Pencak Silat Juara Umum

JAKARTA - Cabang olahraga pencak silat kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Setelah selama sebelumnya menyumbang delapan keping emas, Rabu (29/8) kontingen luar negeri kembali menorehkan emas emas. Total Indonesia menyipat 14 medali emas dan 10 medali yang dipersembahkan. Adapun dua keping emas yang legas diraih pesilat Vietnam. Hasil tersebut memunculkan Indonesia sebagai juara umum di cabang ini.

Emas medali emas yang diperoleh pesilat final Asian Games 2018 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (29/8) dengan oleh Sugianto dan nomor seni tunggal putra. Wewey Wita di kelas B.

(Berlanjut him 7 kol 5)

Pencak Silat Rebut 14 Medali Emas

10 kelas yang dipertandingkan

10 kelas putra
Tunggal, ganda, beregu, kelas B (50-55kg), C (55-60kg), D (60-65kg), E (65-70kg), F (70-75kg), I (80-85kg), dan J (85-90kg)

3 kelas putri
Tunggal, ganda, beregu, kelas B (50-55kg), C (55-60kg), dan D (60-65kg)

Perolehan Medali

Medali Emas

- 1. Tunggul Putra (Puan Anwarul)
- 2. Ganda Putri (Ayu Sidiq Wiantari dan Ni Maste Dewyanti)
- 3. Putri Kelas C (Sarah Tri Muzita)
- 4. Tunggul Putra (Sugianto)
- 5. Ganda Putra (Pala Pramadana Jampil & Herthy)
- 6. Bepu Putra (Nuro Nugraha, Asep Yudianto Sant, Anggi Faisal Mubarak)
- 7. Putra Kelas C (Abdul Malik)
- 8. Putra Kelas D (Rizki Chandra Pratomo)
- 9. Putra Kelas E (Kusung Harli Adi Putra)
- 10. Putra Kelas I (Aji Bangkiti Panungki)

11. Bepu Putri (Prasmita Yuliana, Lutfi Nurhasanah, Gita Tri Lestari)

12. Kelas B Putri (60-65 Kg (Pipet Kurniati))

13. Kelas C Putra (55-60 Kg (Huslan Yusof Kusman))

14. Kelas B Putri (50-55 Kg (Wewey Wita))

Medali Perunggu

- 1. Putra Kelas F (Huslana Amir)

Mediasi Bacaleg Mantan Napi Korupsi Gagal

SEMARANG - Dari 10 pengajuan surat ke bacaleg di Pagar DPRD provinsi kabupaten/kota di Jateng, ada lima yang berhasil di mediasi. Sembilan lainnya gagal di tingkat mediasi dan berlanjut ke proses sidang pengadilan, termasuk proses pengadilan namun belum selesai.

"Kita Divisi Humas Bawaslu Jateng Kofidinkes, keramatis, Bawaslu kabupaten/kota akan segera menggelar tahapan pengadilan guna penyelesaiannya. Bawaslu Jateng telah menggelar proses pengadilan namun belum selesai karena beberapa masalah yang dihadapi saat ini."

SAKSIPKAN PENCAK SILAT: Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Pengurus Besar Rikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Prabowo Subianto saat penyerahan medali kepada atlet-atlet Pencak Silat Asian Games 2018 di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (29/8) (24)

Asian...

(Sambungan Hal 1)

Saya kira ini semuanya untuk Indonesia, untuk negara, untuk rakyat semuanya," ujar Jokowi di arena silat kompleks TMII, Rabu (29/8).

Hal senada juga diutarakan Prabowo. "Saya atas nama masyarakat pencak silat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, dan Ibu Presiden Indonesia. Bayangkan semua hadir di sini, di saat-saat kritis ini, membangkitkan semangat untuk masyarakat pencak silat. Kita bangga bisa berperan, bisa berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa. Kalau sudah untuk negara dan bangsa kita semua bersatu, tidak ada perbedaan," tandasnya.

Jokowi pun menimpali "bersatu, bersatu...!"

Keakraban juga tercipta antara Prabowo dan Megawati. Ada momen saat Megawati memegang pundak Prabowo Subianto, lalu mereka tertawa bersama.

Tidak berhenti dalam jumpa pers, Jokowi dan Prabowo sama-sama mengabadikan momen tersebut di akun Instagram masing-masing.

Melalui akun Instagram @jokowi, orang nomor satu di Indonesia tersebut sekali lagi mengucapkan selamat kepada Hanifan. Dia menceritakan kegembiraannya bisa berada di sana secara langsung menyaksikan para atlet berunding dan merayakan kemenangan bersama Hanifan dan Prabowo.

"Pesilat putra Hanifan Yudani Kusumah merayakan kemenangannya dengan berlari keliling arena lalu naik ke tribun penonton tempat saya

duduk bersama Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami ketiga-Hanifan, saya dan Pak Prabowo pun berpelukan dalam selubung Merah Putih," tulisnya.

Senada dengan Jokowi, Prabowo juga membagikan kebahagiaan tersebut melalui akun Instagram @prabowo dengan foto yang sama.

"Kita boleh berbeda pendapat di antara kita, tapi satu, kalau menyangkut kepentingan nasional kita harus bersatu," ujarnya.

Seperti diketahui, Hanifan Yudani Kusumah unggul atas pesilat Nguyen Thai Linh asal Vietnam di pertandingan kelas C (50-55). Setelah pertandingan, Hanifan melakukan selebrasi dengan berlari mengelilingi arena pertandingan sambil mengibarkan bendera merah putih, kemudian sujud syukur.

Setelah itu, Hanif naik ke area bangku penonton VIP di mana Jokowi dan Prabowo menonton. Saat itulah, terjadi momen mengharukan, Hanif memeluk keduanya sekaligus. Pemandangan ini tentu saja menuai pujian.

Keakraban dan suasana cair antara Presiden Jokowi dan Prabowo yang akan bersaing dalam Pilpres itu menjadi angin segar yang mampu menredakan ketegangan politik antarpemilihan akhir-akhir ini, terutama tentang pro dan kontra aksi deklarasi #2019GantiPresiden. Momen ini tentu menjadi penanda untuk menyudahi benturan antarpemilihan demi kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan nasional. Harapan untuk politik sehat, damai pun muncul dari kedua belah pihak.

PDIP menyambut positif momen Joko Widodo dan Prabowo Subianto

berpelukan bersama pesilat Hanifan.

"Momentum ini bukti yang menunjukkan bahwa persatuan Indonesia ada di atas segala kepentingan politik," ujar politikus PDIP Charles Honoris.

Dia berharap, keharmonisan Jokowi dan Prabowo bisa ditiru oleh para pendukung kedua capres itu. Charles juga memuji Jokowi dan Prabowo yang menunjukkan sikap negarawan.

Hal senada dilontarkan PSI. "Alhamdulillah olahraga dapat menyatukan pemimpin kita. Pertemuan dua tokoh ini tentu menenteramkan pendukung di akar rumput," ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, momentum itu menjadi catatan penting bagi perjalanan demokrasi ke depan.

"Saya kira itu bagus untuk melihat iklim demokrasi ke depan. Jadi memang seharusnya demokrasi kita ini damai, sejuk," kata Fadli.

Hentikan Hoaks

Sebelumnya, saat membuka Kongres Ke-11 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDH) di Yogyakarta, Presiden Jokowi memarahi para pembicara yang mengutarakan kebencian, saling cela, saling maki, saling fitnah, dan penyebaran hoaks di media sosial. Dia mengajak semua optimis dalam membangun daya saing dan produktivitas bangsa.

"Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan, bahwa saat ini kita mengalami perubahan yang cepat. Akibatnya peta ekonomi, politik, dan sosial turut berubah," kata Presiden Jokowi.

Pihak yang paling mampu men-

gantisipasi dan mengatasi perubahan ini adalah anak muda dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

Karena itu, Jokowi minta anak-anak muda dan mahasiswa tidak larut dalam perdebatan di media sosial.

"Jika anak muda mengurusi hal-hal itu, energi kita akan habis. Ini harus diakhiri, untuk itu harus segera diakhiri," pinta Presiden.

Jokowi juga mengajak semua membangun pola pikir baru yang optimis dan berorientasi pada berpikir positif. Sebab tanpa optimisme dalam membangun hal-hal positif, Indonesia tidak akan pernah bisa bersaing dengan negara-negara lain. Jokowi menyatakan pembangunan infrastruktur yang dikebut dalam empat tahun terakhir adalah fondasi ke sana.

"Ke depan infrastruktur ini akan menjadi modal kuat bangsa dalam membangun dengan semangat persatuan, kesatuan, persaudaraan tanpa membeda-bedakan SARA," ujarnya Jokowi.

Dia juga meminta masyarakat tidak membahas hal yang tidak perlu. Presiden menyinggung soal bunyik kritika terkait aksinya dalam pembukaan Asian Games. "Seharusnya, yang perlu dilihat adalah keberhasilan kita bersama sebagai pembangunan yang tidak hanya untuk bangsa kita, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain."

Presidium Pimpinan Pusat KMHDH Pitu Wiratnaya menyatakan organisasinya tidak malu memberi apresiasi kepada Presiden Jokowi yang banyak melakukan perubahan, termasuk pembangunan infrastruktur karena berdampak pada pengurangan angka kemiskinan. "Kami berharap setelah pembangunan fisik, pemerintah wajib membangun sumber daya manusia," katanya. (Sgt.dhc-41)

Edisi Sabtu, 1 September 2018



SILATURAHMI KAPOLDA : Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono bergandengan tangan dengan Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji, Ketua Dewan Pertimbangan Ali Mufiz, Ketua KH Khairi Shodaqoh, dan pejabat Pemprov Jateng sesuai bersilaturahmi di kantor kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Simpanglima, Semarang, kemarin. (27)

MUI Ajak Umat Santun Bermedsos

■ Besok ke Lombok Serahkan Bantuan

SEMARANG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa

Tengah prihatin dengan situasi politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

"Tidak jarang kita tonton di televisi tayangan para politisi yang saling menjatuhkan. Apalagi di media sosial (medsos), terang-terangan saling mengancam, menyebarkan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, dan menjelek-jelekkan orang lain. Kami mengajak mari gunakan medsos dengan santun dan berakhlakul karimah," kata Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji, kemarin.

Ia mengatakan hal itu ketika menerima silaturahmi Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono di kantor kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Jalan Pandanaran 126 Simpanglima Semarang. Kiai Darodji didampingi

Ketua Dewan Pertimbangan KH Ali Mufiz, Ketua KH Kharis Shodaqoh, Sekretaris Umum KH Muhyiddin, dan Sekretaris Komisi Fatwa KH Fadlonan Musyafa. Acara itu juga dihadiri tiga pejabat Pemprov Jateng, yaitu Suko Mardiyono, Budi Santoso, dan Tavif Supriyanto.

"Jangan gunakan medsos untuk bermusuhan. Ini penting kami ingatkan untuk menghindari permusuhan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Gunakan media sosial untuk menyambung silaturahmi dan menambah wawasan, bukan untuk menyebarkan berita hoaks, hasutan, ujaran kebencian,

maupun pesan-pesan bernada provokatif yang membuat gaduh bangsa," katanya.

Ketua Wantim Ali Mufiz mengatakan, di tengah arus informasi yang begitu deras, netizen dituntut lebih cerdas dalam menerima berita dan informasi. Masyarakat perlu melakukan verifikasi atau cek ulang setiap kali menerima berita dan informasi dari media sosial.

Fenomena penggunaan #Ganti-Présiden2019, menurutnya, juga cenderung memancing umat untuk saling berhadapan-hadapan.

Penumpang Gelap

Senada dengan MUI, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengingatkan masyarakat untuk tidak larut dalam suasana tegang di tahun politik. "Kita sudah berkali-kali menyelenggarakan pemilu. Mari kita lewati proses kenegaraan berbangsa dan bernegara itu dengan baik," katanya.

Dalam kesempatan itu Kiai Darodji melaporkan kesiapan MUI

menyalurkan bantuan tahap pertama untuk korban gempa Lombok, Senin. "Dana yang terkumpul dari MUI, Baznas, anggota Korpri, Masjid Raya Baiturrahman Semarang, Masjid Agung Semarang (MAS), dan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), serta spontanitas dari Bapak Kapolda jumlahnya hampir Rp 2 miliar. Akan kami serahkan melalui Gubernur NTB," katanya.

Khusus gempa Lombok, Kapolda menjelaskan pihaknya membantu mengirimkan 100 anggota Brimob untuk membantu evakuasi. "Kapolri sudah menyerahkan bantuan Rp 18 miliar," katanya.

Sementara Polda Jateng dan Kodam IV/Diponegoro telah mengirim 70 truk bantuan berupa sembako, pakaian, dan kebutuhan hidup masyarakat. Sumbangan itu berasal dari Polres dan Kodim se-Jateng.

"Ditambah bantuan khusus dari Kodam IV/Diponegoro dan Polda Jateng enam truk sembako," katanya. (B13-27)

Edisi Selasa, 4 September 2018



Gerakan Tagar Capres Diatur

JAKARTA- Polri mengeluarkan surat perintah untuk jajaran soal pemberian izin acara gerakan tanda pagar (tagar) dukungan capres. Sebab dukungan itu bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

"Jadi kegiatan apa pun itu adalah berdasar UU No 9 Tahun 1998, UU untuk menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa di lingkungan UU. Namun dalam Pasal 6, ada beberapa poin yang harus dipedomani. Pertama dalam menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain," tandas Kadiv Humas Mabes Polri Seryo di Jakarta Convention Center, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (29).

(Bersambung hlm 7 kol 1)

KASUS GRATIFIKASI: Tersangka kasus gratifikasi DPRD Kota Malang Emi Farida (kanan) dan Diana Yanti menaiki mobil tahanan se usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (3/9). (24)

Gerakan...

(Sambungan Hal 1)

Dalam surat telegram yang beredar, munculnya gerakan tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi. Hal itu berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarpengukung capres-cawapres di tengah masyarakat.

Karena itu, jika ada kegiatan dari gerakan tagar dukungan capres yang bersifat penyampaian pendapat di muka umum, wajib diberitahukan secara tertulis.

Hal ini diatur dalam UU No 9 Tahun 1998. Ada lima hal yang harus dipenuhi dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yakni menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian pula kegiatan gerakan tagar pendukung capres yang mengarah pada kegiatan politik. Sesuai PP No 60 Tahun 2017, kegiatan ini juga wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Ada persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi mulai dari melampirkan proposal, susunan pengurus organisasi, hingga denah rute yang akan dilalui jika kegiatan berupa pawai.

"Ketika terjadi konflik polisi bisa mengambil keputusan dengan pasal 15 dimana dalam pasal itu pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan. Apabila tidak memenuhi ketentuan bagaimana dimaksud pasal 6, ini bisa dibubarkan. Kalau dia tidak mau dibubarkan maka dia dikenakan UU Pidana Pasal 211-218," jelas Setyo.

Setyo mengatakan seluruh jajaran Polri akan mendeteksi dan identifikasi potensi kerawanan serta membuat laporan. Selain itu, jajaran Polri melakukan pendalaman terhadap setiap surat pemberitahuan baik terkait latar belakang maupun aktivitas penanggung jawab kegiatan tersebut.

Jajaran Polri juga diminta cermat dan bersikap hati-hati dalam penertiban surat tanda terima pemberitahuan (STTP) yang bermuatan politik dan provokatif menyangkut tema aksi, pertimbangan situasi keamanan wilayah setempat dan kelengkapan persyaratan administrasi.

"Silakan kalau tidak ada penolakan. Di situ ada penolakan kami melakukan penilaian ini boleh atau tidak. Kalau tidak boleh maka kami akan menyarankan tidak boleh. Kalau bubar sendiri Alhamdulillah. Kalau nggak mau bubar, kami bubar. Kalau masyarakat menerima, tidak masalah. Kalau masyarakat mempermasalahkannya, itu bahaya dan bakal timbul kerusuhan," jelas Setyo.

Dukung Polri

Anggota Komisi III DPR F-Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendukung aturan tersebut.

"Itu mengatur, bukan melarang. Mengatur gerakan-gerakan di luar tim resmi KPU. Sementara aturan untuk tim sukses sudah ada PKPU," kata Dasco.

Dia menilai aturan Polri soal tagar dukungan capres itu baik. Asal, Dasco menekankan, Polri berkomitmen untuk tak berpihak.

Anggota Komisi III DPR F-Nasdem Teuku Taufiqulhadi juga setuju dengan aturan Polri terkait gerakan tanda pagar (tagar) pendukung capres.

"Saya setuju. Semua kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, tidak mengindahkan norma yang berlaku, dan berpotensi merusak hubungan sosial yang ada, dibubarkan saja," kata Taufiqulhadi.

Dia meminta publik mendukung imbauan dari Polri karena hal itu demi keamanan dan kenyamanan bersama. (dc-41)

Edisi Kamis, 6 September 2018

Sri Sultan: Merdeka dan Beradab Itu Saling Memperkuat

YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa merdeka dan beradab merupakan dua kata yang saling beriringan dan menguatkan.

Menurutnya merdeka tanpa adab berarti setiap orang bisa berbuat sesuka hati di luar koridor hukum. Sebaliknya beradab tanpa kemerdekaan seperti burung peliharaan yang terkurung di dalam sangkar emas.

Hal itu dikatakannya ketika berbicara dalam dialog kebangsaan dengan tema "Indonesia Merdeka Indonesia Beradab" di kampus Universitas Islam Indonesia, kemarin.

Ia melanjutkan Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan keserasian makna merdeka dan nilai keadaban. Pancasila menjadikan pendidikan ilmu hukum memperoleh landasan spiritual moral dan etik yang bersumber dari kepercayaan kepada Ketuhanan

Yang Mahaesa dan berkebudayaan, sebagaimana pida-to lahimya Pancasila oleh Bung Karno.

"Di tengah suburnya tebaran virus dan merasuknya infeksi di Indonesia, kaum intelektual hendaknya merasa terpanggil untuk menyirami Indonesia dengan air kesejukan. Air membawa harapan yang mengingatkan kalau masih ada obat, masih ada jalan ke luar dan masih akan ada Indonesia pada masa depan," papar Sri Sultan.

Penolakan Mahfud

Sementara itu anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengatakan kelompok gerakan #2019ganti presiden pernah menghubunginya untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.

Namun dia menolak karena perbedaan keinginan. "Pernah diajak untuk bergabung dengan mereka yang aktif dalam gerakan ganti presiden tapi karena ada perbe-

daan keinginan saya tidak ingin ikut," ungkap Mahfud.

Ia menjelaskan sejumlah orang memintanya bergabung namun dirinya tidak ingin menggunakan #2019ganti presiden tetapi #2019pemilihan presiden. Ia menggagas itu karena melalui pemilihan presiden dapat saja terjadi ganti presiden tetapi bisa juga petahana kembali mendapatkan posisinya.

Lebih jauh ia mengungkapkan kelompok yang memintanya bergabung dengan ganti presiden meminta agar Mahfud MD mau direkam dan kemudian diviralkan. Namun isi rekamannya ganti presiden dan ia tetap menolak.

"Saya dihubungi kelompok ganti presiden untuk membuat dukungan atau memberi penjelasan yang sifatnya testimoni. Saya bilang saya tidak mau, saya tidak setuju. Saat itu saya mau kalau tagamya 2019 pemilihan presiden," tandasnya. (D19-19)

B. Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat

Edisi Minggu, 2 September 2018

RENCANA KEGIATAN JALAN SEHAT DI SOLO Ditolak Oleh Sejumlah Elemen Masyarakat

SOLO (KR) - Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Hilmi Ahmad Saktillah mengatakan pihaknya menyerap aspirasi dari massa akar rumput Solo Raya, terkait akan dilangsungkannya jalan sehat, Minggu (9/9) di Kota Barat, Solo.

Intinya, PCNU tidak setuju rencana kegiatan jalan sehat yang dianggap bermuatan politis, karena diperkirakan bisa menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

"Untuk lebih efektif membahas berbagai situasi serta program PC NU se Subosukowonosraten (Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan dan Klaten), hari ini Minggu (2/9) pimpinan PC NU se Subosukowonosraten akan rapat di kantor PAC NU Jalan Honggowongso, Solo. "Memang ada wacana, Ketua PAC NU se Solo Raya akan membuat surat pernyataan menolak kegiatan

jalan sehat tersebut dan akan ditandatangani semua Ketua PAC NU Se Solo Raya. Surat tersebut akan dikirimkan ke Bupati, Komandan Kodim (Dandim) dan Kapolres se Solo Raya," paparnya. Untuk membantu menciptakan kondusivitas kota Solo, masalah pengerahan ribuan barisan serba guna (Banser) nanti akan dibicarakan di forum pertemuan pimpinan PC NU itu.

Seperti diketahui, rencananya aksi jalan sehat akan digelar sejumlah elemen masyarakat Solo pada Minggu (9/9) mendatang di Lapangan Kota Barat Solo. Namun jalan sehat tersebut dianggap bermuatan

politik dengan indikasi adanya to-koh dari luar Solo seperti Neno Warisman dan Achmad Dani.

Di sisi lain akan digelar tuntutan kepada pemerintah untuk turunkan harga bahan bakar minyak (BBM), turunkan tarif listrik, dan turunkan sembilan bahan pokok (sembako).

Menurut Hilmi Ahmad Saktillah, berdasarkan informasi yang diterimanya seperti di Surabaya dan Riau, kota yang didatangi dua tamu itu justru kurang produktif menimbulkan pro dan kontra.

"Memang sekarang ini era demokrasi, tapi seharusnya sebagai tamu mereka harusnya empati, kalau mereka ditolak oleh masyarakat, tetapi tetap memaksa, dipastikan akan memunculkan keresahan. Apalagi, di tempat dan waktu yang sama, akan ada kegiatan tahunan Pemerintah kota Solo yakni penye-

lenggaraan Pekan Olahraga Warga Solo (Porwaso). "Jadi imbauan saya mari sesama komponen masyarakat menjaga kondusivitas sebuah kawasan, seperti Solo dan wilayah sekitarnya," paparnya.

Pada Porwaso, kegiatannya sudah dibatasi dan akan mengedepankan kegiatan olahraga tradisional. "Kalau kemudian ada pihak luar yang tidak setuju permainan tradisional seperti, senam, tarik tambang, gobak sodor diubah menjadi selera tamu itu seperti demo memprotes BBM serta memplintir untuk kegiatan politik, berarti itu memaksakan kehendak," ujar Hilmi Ahmad.

Hilmi Ahmad menambahkan seharusnya kalau memang akan olahraga gerak jalan sehat, ya olahraga saja jangan dicampuradukkan dengan menuntut macam-macam.

(Hwa-c)

Edisi Kamis, 6 September 2018

"KASUS MALANG" BISA TERULANG
Jika Eks Napi Korupsi Jadi Wakil Rakyat



KR-Franz Boediakumanto

Dr Artidjo Alkostar SH MH diapit Prof Dr Moh Mahfud MD (kanan) dan Direktur CNN Indonesia Alfito Deannova Gintings.

SLEMAN (KR) - Keikutsertaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatur mantan napi korupsi menjadi caleg, dinilai membuat suasana kacau. Karena partai politik (parpol) yang sudah mengikuti aturan Peraturan KPU 20/2018 menjadi tidak taat. Jika larangan itu dikaitkan hak asasi manusia (HAM), bisa dikatakan tidak pas. Sebab, sebagai warga, HAM-nya sudah

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Jika

digunakan saat menjabat yang dulu dan kemudian tidak amanah. Bahkan bisa dikatakan, caleg mantan napi merusak integritas pemilu. Bila sampai lolos, 'kasus Malang' bisa terulang lagi di masa mendatang.

Hal itu dikemukakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD, mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar dan pakar politik Azyumardi Azra dalam Dialog Kebangsaan yang diprakarsai Universitas Islam Indonesia (UII), Rabu (5/8) di Auditorium Kahar Muzakir UII Jalan Kaliurang Ngaglik Sleman. Dalam dialog bertema 'Indonesia Merdeka, Indonesia Beradab' ini menghadirkan pembicara kunci Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Hadir pula narasumber budayawan Zawawi Imron. "Meski UU tidak melarang, secara moral, mantan napi koruptor tidak layak menjadi caleg," tandas Mahfud.

Larangan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan mantan koruptor tercantum dalam PKPU 20/2018 dan sudah diundangkan, sehingga sah diberlakukan. Oleh karena itu, Bawaslu tidak bisa ikut campur. Penyelesaian masalah ini menjadi kewenangan MA, bukan Bawaslu. "Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar mengingatkan agar tidak menggunakan alasan hak untuk menerima mantan napi korupsi. Hak itu sudah diberikan dulu, tapi dia ti-

dak amanah menjalankan hak yang diberikan tersebut. Jadi hak itu sudah habis. Jangan lagi berkilah dengan atas nama hak," tegas Artidjo. Secara sosial, ujar Artidjo, masa depan bangsa harus diberi pencerahan. Dalam hal ini, bangsa Indonesia harus melihat masa depan lebih baik lagi. "Jangan beri kesempatan lagi orang-orang yang mengkhianati rakyat," tambahnya.

Sementara Azyumardi Azra menyebutkan, pencalegan napi bisa merusak integritas pemilu. "Ini bukan hanya hal-hal administratif, DPT. Namun, juga penyelesaian yang adil dan jujur," katanya. Ia menilai, kalau caleg sudah rusak integritasnya, akan terjadi kasus-kasus seperti DPRD Malang. Ini jangan sampai terulang. Kalau masih lolos, Indonesia tidak akan pernah bersih dari korupsi.

Sebelumnya, Mahfud MD curhat kepada mahasiswa, saat diminta membuat testimoni gerakan #2019 gantipresiden. "Belum saya hapus, WA tanggal 28 Maret lalu saya dihubungi untuk membuat dukungan atau penjelasan. Waktu itu langsung saya jawab tidak setuju. Saya menyanggupi jika hastag2019 sudah menjadi #2019 pemilihan presiden," jelasnya. Alasannya, dalam pemilihan tersebut bisa mengganti, namun juga bisa tidak mengganti.

Walau demikian Mahfud menyebut bila tagar itu tidak salah dan bukan makar.

Sambungan hal 1

Karena dalam KUIHP yang dimaksud makar merampas kemerdekaan presiden-wakil presiden dan menggerakkan menggoni ideologi Pancasila.

Sementara pakar politik Azyumardi Azra menilai adanya pertanggungjawaban karena ada cawapres yang diperkenankan pejabat publik ke kampus-kampus. Menurutnya, hal tersebut termasuk pelanggaran karena mencuri start kampanye. Di sini menurutnya mahasiswa harus memiliki jiwa kritis terhadap capres-cawapres yang bertemu di Pilpres 2019 mendatang.

Pidato kunci Sri Sultan Hamengku Buwono X mengemukakan, dalam hubungan moral dan hukum ada beberapa pola yang menjadi sandaran penegakan. Salah satu potanya adalah penegakan moral Pancasila melalui perjuangan di tengah pertarungan kekuatan dan kekuasaan. "Dalam perjuangan ini, moral tidak lebur dalam politik dan hukum. Tapi mengambil jarak dan berbagi lahan. Maka kegagalan sistem politik dan hukum tidak bisa dikatakan kegagalan moral," ungkapnya.

Pancasila menurut Sultan sebagai ideologi terbuka memiliki dua dimensi nilai, ideal dan aktual. Namun kini diperganuki nilai-nilai neo-liberalisme yang bersamaan globalisasi informasi juga, ditumpangangi *free-riktor* paham radikalisme agama yang menarknya ke ranah politik identitas. (Fsy)-d



C. Surat Kabar Harian Republika

Edisi Minggu, 30 September 2018



Tak pelak aksi oleh massa akar rumput itu memunculkan gesekan. Gerakan didukung-mendukung dan tolak-menolak sempat mevaria di sejumlah daerah. Ada yang dilarang hadir ke pusat deklarasi dukungan dan akhirnya pulang dengan alasan keamanan, ada pula yang bebas menggelar sosialisasi klubnya. Kontroversi pun memuat menghabiskan energi. Ada yang sengaja memanas-manasi, ada pula yang meredakan. Kontroversi di media sosial malah lebih bervariasi dan lebih menguras emosi. Energi seolah habis-habis demi memenangkan masing-masing kubu dengan berbagai sindiran, ejekan, dan pernyataan bernada perseteruan dan kebencian. Seolah tak lagi mengingat bahwa mereka adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ironisnya, masa kampanye belumlah dimulaili.

Rangkaian Hanifan kepada Jokowi dan Prabowo mesti dimaknai sebagai semangat kebangsaan dan persatuan. bahwa kontestasi politik tidak harus mengorbankan persatuan dan persaudaraan. Kontestasi Pilpres 2019 barulah menjadi ranah untuk memaparkan program kerja masing-masing kubu jika berkuasa. Bukan untuk saling menghinjat, memfitnah, dan membuat kampanye hirani lainnya.

Apa yang dipertontonkan para elite politik negeri ini saat menyaksikan partai final pencak silat ini sebagai petanda kesetiaan anak bangsa. Sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi, "Saya hadir di sini untuk menyemangati dan memberikan semangat kepada teman baik saya, Pak Prabowo."

Seraya berkelekar, Jokowi mengukir spontanitas memeluk balik Hanifan. "Saya tidak tahu, tiba-tiba dia diangkat pelukan. Cuma bau, tapi baunya harum karena (adlet silat Indonesia) memang."

Prabowo pun mengungkapkan kegenitannya mengomentari rangkaian Hanifan. Ralihan medali emas Hanifan membangkitkan semangat masyarakat pencak silat. "Kita bangga bisa berperan, bisa berbuat yang baik untuk negara dan bangsa. Kalau sudah untuk negara dan bangsa, kita bersatu, tidak ada perbedaan," kata Prabowo.

Hanya di Asian Games, semangat persatuan dan kesatuan ini menemukan momentumnya. Asian Games yang merayakan Jubelan. Mari jaga terus spirit ini kendati Asian Games selesai dibela! ■

Edisi Kamis, 3 September 2018

Jokowi: Berpendapat Ada Batasannya

JAKARTA — Polemik pelarangan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden beberapa hari terakhir menjadi perhatian semua pihak. Rencana deklarasi gerakan yang digagas Mardani Ali Sera di sejumlah daerah dibubarkan oleh kepolisian.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hal itu merupakan kewenangan kepolisian. Menurut dia, hal tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan di masyarakat.

"Nanti kalau misalnya polisi *enggak* melakukan apa-apa, kalau kemudian terjadi benturan, yang disalahkan siapa? Polisi lagi. Saya kira proses-proses pencegahan seperti itu sudah menjadi tugas aparat," kata Jokowi sesuai menghadiri acara Pekan Orientasi Caleg Partai

Nasdem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (1/9).

Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia adalah negara demokrasi. Oleh karena itu, warga negara diberikan kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. "Tapi ingat, ada batasannya, yaitu aturan-aturan," kata dia.

Pada Ahad (26/8), polisi membubarkan massa aksi deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya. Massa yang bergerak ke Jalan Indrapura diadang sekelompok massa yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden. Untuk menghindari bentrokan saat bubar, polisi membubarkannya secara terpisah.

Sehari sebelumnya, aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman juga menghadapi peno-

lakan ketika menghadiri deklarasi di Riau. Tidak hanya penolakan dengan unjuk rasa, mobilnya juga dilempari batu sampai dia dibawa kembali ke bandara untuk diterbangkan ke Jakarta.

Di pihak lain, Mardani Ali Sera meragukan kebebasan berpendapat yang diungkapkan Jokowi tersebut. Ia meminta masyarakat menilai sendiri apakah kebebasan berpendapat di Indonesia berkembang dengan baik. "Kami serahkan kepada publik untuk menilai adakah demokrasi, khususnya menyampaikan pendapat, berkembang di negeri ini," kata Mardani.

Ia mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden adalah hak warga negara yang diatur oleh undang-undang. Ia pun merasa selama ini telah menyampaikan pendapat bersama rekan-rekan-

nya dengan cara yang benar sesuai aturan yang berlaku.

Ia mengungkapkan, selama ini selalu mengurus perizinan ketika akan melakukan gerakannya tersebut. Bahkan, selain mengurus perizinan, pemberitahuan juga selalu dilakukan ketika akan melakukan deklarasi di wilayah manapun di Indonesia.

"Gerakan #2019GantiPresiden adalah hak warga negara dan cara penyampaian juga diatur secara konstitusional sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 sehingga tidak ada alasan yang tepat bagi pemerintah menghalangi masyarakat," katanya.

Juru Bicara Koalisi Indonesia Kerja pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin (KIK), Farhat Abbas, mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden merupakan

REPUBLIKA SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

Polri Terbbitkan Arahannya Deklarasi

• ARI SATIRO NINGROHO, FEBRUANTO ADI SARIPTRO

Polri menanti tiga tagar sebagai kegiatan politik.

JAKARTA — Polri menentapkan arahannya dengan mendeklarasikan sikap terhadap tiga tagar yang muncul di media sosial, yakni #2019Presiden, #2019Pribowo, dan #2019GantiPresiden. Polri menanti tiga tagar tersebut sebagai kegiatan politik.

Sebelumnya, Polri telah mengeluarkan pernyataan bahwa ketiga tagar tersebut merupakan kegiatan politik yang bertujuan untuk menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo. Polri juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa ketiga tagar tersebut merupakan kegiatan politik yang bertujuan untuk menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo.

Polri menanti tiga tagar tersebut sebagai kegiatan politik. Polri menanti tiga tagar tersebut sebagai kegiatan politik. Polri menanti tiga tagar tersebut sebagai kegiatan politik.

REPUBLIKA SELASA, 8 SEPTEMBER 2018

Sikap Bawaslu Disol Terkait Perang Tagar

• MURSALI YASLIQAND, RONGGO ASTUNGKORO

JAKARTA — Lembaga Bawaslu Indonesia, melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan sikap terhadap tiga tagar yang muncul di media sosial, yakni #2019Presiden, #2019Pribowo, dan #2019GantiPresiden.

Bawaslu menyatakan sikap terhadap tiga tagar tersebut sebagai kegiatan politik. Bawaslu menyatakan sikap terhadap tiga tagar tersebut sebagai kegiatan politik. Bawaslu menyatakan sikap terhadap tiga tagar tersebut sebagai kegiatan politik.

Bawaslu menyatakan sikap terhadap tiga tagar tersebut sebagai kegiatan politik. Bawaslu menyatakan sikap terhadap tiga tagar tersebut sebagai kegiatan politik. Bawaslu menyatakan sikap terhadap tiga tagar tersebut sebagai kegiatan politik.